

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN  
NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA  
DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

**TESIS**



Oleh:

**Dwi Pratiwi Markus, S.H**

N.I.M : MKn.03.VII.160343

Program Studi: Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2017**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN  
NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA  
DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**

**Oleh:**

**Dwi Pratiwi Markus, S.H**

N.I.M : MKn.03.VII.160343

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURUDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

#### TESIS

Oleh:

**Dwi Pratiwi Markus, S.H.**  
N.I.M : MKn.03.VII.160343  
Program Studi: Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal

**Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
NIDN: 06-0612-6501

Pembimbing II

Tanggal

**Dr. H. Ahmad Khisni, SH., M.Hum**  
NIDN: 06-0408-5701



Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

**Dr. H. Ahmad Khisni, SH., M.Hum**  
NIDN: 06-0408-5701

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS YURUDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

#### TESIS

Oleh:  
**Dwi Pratiwi Markus, S.H**

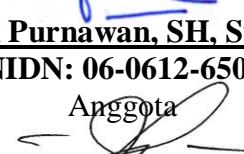
N.I.M : MKn.03.VII.160343  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan dinyatakan.....

Tim penguji  
Ketua,

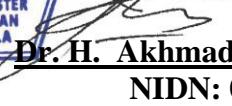
  
**Prof. Dr. H. Mahmuhtarom, SH.,MH**  
NIDN:0618035901

Anggota

  
**Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
NIDN: 06-0612-6501  
  
**Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.Hum**  
NIDN: 06-0408-5701



Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

  
**Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.Hum**  
NIDN: 06-0408-5701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dwi Pratiwi Markus, S.H.

NIM : M.Kn.03.VII.160343

Program Studi : Magister kenotariatan

Fakultas/ Program: Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung cirri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Dwi Pratiwi Markus, S.H  
NIM: M.Kn.03.VII.16034

## ABSTRAK

*Dwi, Pratiwi Markus. 2017 ANALISIS YURUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT. Tesis, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum., Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.Hum.*

*Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah adat (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum adat dan peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Kota Sorong Papua Barat ditinjau: Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan hukum adat dan tanah, sementara empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang didasarkan pada perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.*

*Penelitian ini menghasilkan (1) Pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap keberadaan tanah dan hukum adat dituangkan dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam Proses pendaftaran tanah adat di Kota Sorong tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah pada umumnya. Hanya saja pendaftaran tanah adat di Kota Sorong harus dibuktikan dengan beberapa syarat yang ditetapkan dalam hukum adat setempat dan telah diatur juga dalam PP. No 24 Tahun 1997 (2) UUPA sendiri merupakan hukum agraria nasional yang kehadirannya didasarkan pada hukum asli indonesia yang dikenal dengan sebutan hukum adat, sehingga untuk melakukan pendaftaran tanah di Kota Sorong harus menggunakan surat pelepasan adat dari kepala adat setempat, dalam proses inilah peranan Notaris-PPAT sangat dibutuhkan dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan adat dan peran PPAT dalam membantu masyarakat yang tidak paham aturan adat setempat dalam proses pendaftaran tanah adat selama yang dilakukan tidak menlanggar aturan terkait kewenangan PPAT yang ditetapkan oleh PerKaBPN No. 8 Tahun 2013.*

*Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Hukum Adat, Peranan Notaris-PPAT, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).*

## ABSTRACT

**Dwi, Pratiwi Markus.** 2017 JURIDIS ANALYSIS OF CUSTOMARY LAW POSITION AND THE ROLE OF NOTARY PPAT IN THE LAND REGISTRATION PROCESS BASED ON THE PRINCIPAL AGRARIAN LAW IN SORONG CITY WEST PAPUA. Thesis, Departemen of Magister Kenotariatan, College of Law, Sultan Agung Islamic University, Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum., Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.Hum.

*This research aims (1) To know and analyze how the process of registration of customary land (2) To know and analyze the position of customary law and the role of Notary-PPAT in the process of land registration in Sorong City West Papua reviewed: According to the Principal Agrarian Law.*

*This research uses a juridical-empirical approach. Yudiris is used to analyze rules relating to customary law and land, while empirical is used to analyze laws based on the behavior of people who always interact in daily life.*

*The result of this research are (1) Government of Indonesia recognition of the existence of land and customary law is set forth in UUPA and PP. 24 of 1997 on Land Registration, so that in the process of registration of customary land in Sorong city is not much different from the registration of land in general. Only the registration of customary land in Sorong must be proven by several conditions that specify in local customary law and has been arranged also in the PP. No. 24 of 1997 (2) UUPA itself is a national agrarian law whose presence is based on indigenous laws of Indonesia known as customary law, so to conduct registration of land in Sorong City must use letters of customary release from the local customary chief, in this process the role of Notary-PPAT is needed in making the declaration of customary release and the role of PPAT in helping people who do not understand the rules of local custom in the process of registration of customary land as long as it does not violate the rules related to PPAT authority set by PerKaBPN No. 8 Year 2013.*

**Keywords:** *Land Registration, Customary Law, Role of Notary-PPAT, UUPA (Principal Agrarian Law).*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim.  
Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT.”

Secara khusus penulis sampaikan terimakasi kepada orang tua penulis (Markus Ramba dan Cicily Watulingas. Nasrul dan Eka Suwardi N) yang selalu memberikan semangat dan ridhonya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini baik secara moril maupun materil.

Tidak terlupakan juga pihak-pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan maka tesis ini tidak akan terselesaikan, dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasi kepada:

1. H. Anis Malik Toha L.c, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum. dan Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.Hum. Selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan dan masukan dengan ikhlas & tulus dalam penulisan Tesis ini

4. Bapak dan ibu dosen yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
5. Karyawan/karyawati dan staff Tata Usaha Fakultas Hukum Unissula yang telah membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Unissula.
6. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Badko Jateng-DIY, Cab. Semarang dan Korkom Sultan Agung yang selalu memberikan support dan DOA serta bantuan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini kerena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 20 Juli 2017  
Penulis

Dwi Pratiwi Markus, SH